

IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI PANCASILA PADA UMKM PEDAGANG SATE

**Rafli Riski Ramadan; Fihra Rizqi; Roshan Ismail; Hadi Lesmana; Fakultas
Hukum, Universitas Pasundan, rafliriski0101@gmail.com**

ABSTRACT: The populist economic system is an appropriate and appropriate solution to be implemented in Indonesia which is based on Pancasila. the application of a Pancasila-based economy that explains strategies for the continuity of the marketing of MSME products. During the pandemic, we saw many MSMEs slump, but as soon as we see that currently as many as 84.8% of MSMEs that were in a slump have returned to normal operations. The current decline in economic stability in Indonesia shows that the implementation of the Pancasila economy itself has been deviated and shifted by the existence of a capital-liberal economic system which has ultimately led to social economic inequality. in the Pancasila economic system for MSME business actors, namely Taichan Sate Traders. Another objective is to examine how much influence the Pancasila economic system has on small micro entrepreneurs whether it is appropriate or actually hinders their growth progress. The approach method used in this study is qualitative and the data sources used are primary and secondary data. Then the data collection technique used by purposive sampling where through observation, interviews, and data analysis techniques used. The results of the study show that the Pancasila economic system which is based on kinship shows the identity of the Indonesian people who like to run the Gotong-royong system. Referring to Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution confirms that "The economy is structured as a joint venture based on the principle of kinship." The meaning contained in the verse is very deep, namely that the economic system that is developed should not be based on competition and on a very individualistic principle.

KEYWORDS: Pancasila, MSMEs, Business.

ABSTRAK: Sistem perekonomian kerakyatan menjadi solusi yang patut dan sesuai diterapkan di Indonesia yang bersandarkan pada Pancasila. penerapan ekonomi berbasis Pancasila yang menjelaskan strategi untuk kelangsungan pemasaran produk UMKM. Selama pandemi, kita melihat banyak UMKM terpuruk, tapi begitu kita melihat saat ini sebanyak 84,8% UMKM yang tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal. Penurunan stabilitas perekonomian di Indonesia saat ini semakin menunjukkan bahwa implementasi ekonomi Pancasila sendiri telah melenceng dan tergeser oleh keberadaan sistem perekonomian liberalis kapital yang akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan perekonomian masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk membahas kemajuan terhadap UMKM di negara Indonesia yang Selaras dengan prinsip-prinsip yang di dalam sistem perekonomian Pancasila terhadap Pelaku usaha UMKM Yaitu Pedagang Sate Taichan. Tujuan

lainnya adalah untuk meneliti seberapa besar pengaruh sistem ekonomi pancasila terhadap pengusaha mikro kecil apakah tepat atau justru menghambat kemajuan pertumbuhannya. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara purposive sampling dimana melalui observasi, wawancara, dan teknik analisis data yang digunakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem ekonomi pancasila yang berasaskan kekeluargaan menunjukkan identitas masyarakat Indonesia yang gemar menjalankan sistem Gotong-royong. Mengacu kedalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik.

KATA KUNCI: Pancasila, UMKM, Bisnis

I. PENDAHULUAN

Implementasi konsep ekonomi Pancasila menjadi sangat penting mengingat fenomena global kapitalisme yang dipadukan dengan pandemi virus Covid-19 yang terus menerus menyebabkan kemerosotan stabilitas ekonomi. Kemunduran stabilitas ekonomi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ekonomi Pancasila sendiri telah berubah dan berubah karena adanya sistem ekonomi kapitalis-liberal, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberadaan implementasi ekonomi Pancasila dalam berbagai kebijakan pemerintah dalam menghadapi gempuran kapital liberal global (Marsudi, 2022).

Bangsa Indonesia telah lama menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi sebagai tantangan nyata untuk mendukung perekonomian nasional sebagai kearifan lokal tanpa tertinggal dari perkembangan dan kemajuan dunia. Situasi ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat mendesak bagi para pelaku ekonomi, masyarakat dan khususnya pemerintah untuk memulai aturan dan kebijakan ekonomi Indonesia yang harus tetap mengedepankan ekonomi kerakyatan Pancasila (Marsudi, 2022). Fajar era globalisasi telah membuat negara-negara di dunia hampir tidak terbatas. Globalisasi itu sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Saat ini, efek tersebut telah terjadi dan sangat terasa dalam kaitannya dengan ekonomi, kedatangan globalisasi tentunya mengikuti adanya ideologi kapitalis yang sangat individualistis dan hanya membela prinsip keuntungan (Hosein, 2016).

Akibatnya, masuknya nilai-nilai global dari berbagai belahan dunia kini mengancam eksistensi Pancasila akibat kebebasan yang berlebihan. Eksistensi Pancasila terancam jika pendirian negara dan susunan katanya dalam konstitusi tidak dijadikan sebagai ukuran dan acuan pemikiran, politik dan tindakan kemasyarakatan, sedangkan di sisi lain serangan terhadap nilai-nilai global terus menyiksa kita. Bangsa (Kurniawan, 2017). Sistem ekonomi kerakyatan merupakan solusi yang tepat dan nyaman yang dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan Pancasila. Penerapan ekonomi berbasis Pancasila untuk menjelaskan strategi menjamin kesinambungan komersialisasi produk UMKM.

Dalam rangka membangun perekonomian nasional, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan arahan untuk melaksanakan pembinaan UMKM golongan dan modernisasi koperasi. Peranan UKM dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat besar yaitu mencapai 99% dari seluruh unit usaha. Pangsa UKM dalam produk domestik bruto juga 60,5% dan pangsa lapangan kerja 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. “Ini merupakan mesin krusial bagi perkembangan ekonomi kita. Makanya kita sangat bergantung pada UMKM kita (Marsudi, 2022).

Selama pandemi kami melihat banyak usaha kecil dan menengah menurun, tetapi ketika kami melihat hingga 84,8% UKM yang saat ini dalam resesi telah kembali beroperasi normal. Kebijakan pemerintah di masa pandemi terbukti sangat efektif dalam implementasinya,” ujar koordinator ekonomi digital, ketenagakerjaan dan usaha mikro, menengah, dan mikro ini. Sebelumnya, situasi UKM lokal memburuk dalam dua tahun pertama pandemi Covid-19. 19 pandemi, yaitu H. tahun 2020-2021. Hasil survei terhadap 1.180 UMKM yang disurvei oleh UNDP dan LPEM UI menunjukkan bahwa saat itu lebih dari 48% UMKM menghadapi masalah bahan baku, 77% mengalami penurunan pendapatan dan 88% mengalami penurunan permintaan produk UMKM. , dan hingga 97% UKM mengalami penurunan nilai aset (Ekon, 2022).

II. METODE

Metode penelitiannya adalah filsafat hukum sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pencarian, karena konstruksi hukum sebagai cermin kehidupan masyarakat dalam prakteknya mengikuti bahwa setelah tahap pendataan selesai, tidak hanya yang disebutkan dalam hukum tertulis. , adalah; dikumpulkan, tetapi valid sebagai pengamatan terhadap perilaku yang sebenarnya.

Susanto menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menekankan pada model perilaku manusia yang terlihat dari “frame of reference” penulis sendiri, sehingga individu harus dipahami sebagai aktor sentral dan merupakan unit analisis dan ditempatkan sebagai bagian darinya. keseluruhan (komprehensif). Prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif yang berasal dari tulisan atau dari ekspresi dan perilaku yang diamati pada orang (Susanto, 2015).

III. HASIL

Berawal dari sekelompok anak muda yang melihat peluang bisnis berjualan Sate Taicha, mereka menggalang dana untuk modal awal melalui usaha patungan. Modal tersebut kemudian digunakan bersama untuk memajukan usaha tanpa memisahkan keuntungan dan usaha.

Konsep Sate Taichan "Goreng" awalnya dikembangkan pada tahun 2016, dan setelah pengembangan bisnis dan diskusi, Restoran Sate Taichan "Goreng" membuka cabang pertamanya di Bandung. Ide awal Sate Taichan "Goreng" adalah untuk memperkenalkan kuliner sederhana Sate Taichan, yang berbeda dari sate tradisional karena tidak menggunakan bumbu kacang tetapi menggunakan saus sambal, yang secara tradisional dijual di gerobak hingga tingkat tertinggi. konsep kuliner yaitu membawanya ke level restoran (Al-Hakim, 2021). Sistem bisnis menggunakan sistem ekonomi Pancasila dan juga merupakan sistem ekonomi yang diakui negara Indonesia yang berbasis kekeluargaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dalam perilaku, pemikiran dan tindakan sebagai sistem ekonomi (*homo economicus*) dan juga dalam praktik ekonomi . . tanpa melupakan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

Konsep dan nilai ekonomi sistem ekonomi pancasila harus dianut oleh para pengusaha besar maupun kecil, karena dianggap sesuai dengan budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Dalam penerapan sistem ekonomi pancasila pada pedagang sate taichan tergolong terapan karena penerapan sistem ekonomi pancasila pada UMKM terbukti efektif karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Menurut Salim, berfungsinya ekonomi didasarkan pada faktor-faktor berikut. Faktor internal yang dapat ditemukan biasanya adalah kondisi fisik, letak geografis, kuantitas dan kualitas sumber daya alam, dan situasi sumber daya manusia. Faktor eksternal meliputi keadaan

keamanan global, ekonomi dan politik dunia, serta perkembangan teknologi dan informasi (Salim, 2019).

Dari perspektif keuangan, sebagian besar usaha kecil lebih mengandalkan ekuitas mereka, yaitu. H. Hutang komersial berdasarkan saling percaya. Pembiayaan lembaga keuangan sebagian besar berasal dari perbankan, terutama kredit perdagangan (hampir 80%). Rasionalisasi sistem kredit program di sektor UKM pada prinsipnya dimungkinkan melalui kredit bank umum.

IV. PEMBAHASAN

Dalam hal ini. Sistem ekonomi Pancasila adalah “sesuatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berlandaskan kekeluargaan dan gotong-royong. Sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara memang sesuai dengan filosofi hidup negara yang berkaitan, begitu pula dengan Indonesia”. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yang seperti terdapat pada UUD 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B No. 14 seperti berikut ini:

Pasal 33 Setelah Amandemen 2002

- “1. Perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan disusun sebagai usaha bersama.
2. Sumber daya yang meliputi bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung dalam nya, dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
3. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

Selain kelebihan dan kekurangan ekonomi pancasila, perekonomian indonesia termasuk salah satu ekonomi yang berkembang saat ini, terutama bagi para pemula yang ingin memulai bisnis atau startup yang kurang lebih mengadopsi pancasila. Sistem ekonomi untuk mendapatkan pasar konsumennya di Indonesia. Kebutuhan akan alat kebijakan moneter yang menggambarkan fungsi sistem ekonomi pancasila telah berhasil dilaksanakan.

Sistem ekonomi pancasila juga mengupayakan agar negara kita menjadi negara yang merdeka atau berdiri di atas kaki sendiri, sehingga negara kita tidak bergantung pada pihak asing. Kerjasama dengan negara lain boleh saja, tetapi negara kita tidak boleh lemah, juga harus kuat, agar tidak merugikan dan merugikan pihak lain. Kerja sama harus menguntungkan kedua belah pihak. Rumusan nilai-nilai Pancasila tersebut tertuang dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi harus selalu menjadi acuan dalam setiap tahapan kebijakan pemerintahan. Konstitusi selain menjadi pertimbangan dalam pembentukan kebijakan ekonomi, juga menjadi acuan dalam implementasi kebijakan tersebut secara langsung dan sebagai tolak ukur dalam menilai kebijakan yang telah dilaksanakan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang selaras dengan kepribadian bangsa dengan berbagai tujuan dan cita-cita yang tersirat di dalamnya, tentu sangat cocok sebagai alat ukur analitis untuk mengukur keketatan kebijakan ekonomi aktual (Baswir, 2019).

Proses pembuatan Sate Taicha sendiri tidak rumit, modalnya tidak terlalu besar, namun memiliki keuntungan peluang usaha yang besar. Walaupun banyak tantangannya. Salah satunya menentukan lokasi perusahaan. Selain memilih tempat yang ramai/strategis, tempat tersebut juga harus terbuka atau di luar, karena proses pembuatan sate perlu dibakar dengan arang. Anda bisa mengasapinya tanpa arang, tapi rasanya dijamin beda. Bahkan rasa hujan bisa hilang begitu saja. Nah, Sate Taichan yang cukup terkenal di Jakarta adalah Sate Taichan Senayan. Gerobak para pedagang Sate Taichan berjejer rapi disana dan

kita tinggal menentukan pedagang mana yang akan membeli Sate Taichan tersebut.

Proses pembuatan sate taicha tidak rumit dan modalnya tidak terlalu besar, sehingga keuntungannya menjadi peluang bisnis yang besar. Meski banyak tantangannya, salah satunya memilih lokasi yang strategis, lokasinya juga harus di ruang terbuka karena produksi sate membutuhkan batu bara sebagai bahan bakarnya. Anda bisa memanggangnya tanpa arang, tapi itu sangat mempengaruhi rasanya, rasanya berbeda. Rasa sate bisa hilang. Memang, UKM adalah fondasi ekonomi mikro dan makro. Karena hal ini bisa dikarenakan berkurangnya lahan pertanian, menyusutnya industri, ketatnya persaingan hidup dan lainnya. Ketidakmampuan banyak sektor ekonomi lainnya untuk memungkinkan UKM memanfaatkan peluang tersebut. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membentuk empat kelompok industri.

Pada saat yang sama, secara umum menjadi jelas bahwa UKM memainkan peran penting dalam masyarakat di tengah krisis ekonomi. Dengan mempromosikan UKM, ekonomi juga harus pulih. Begitu pula dengan sektor informal. Usaha kecil sendiri sebagian besar bersifat informal dan karena itu relatif mudah bagi pemain baru untuk masuk. Pendapat tentang peran UKM atau sektor informal memang benar, setidaknya dalam perannya dalam meminimalkan dampak sosial dari krisis ekonomi, terutama masalah pengangguran dan hilangnya pendapatan.

Dapat dikatakan bahwa UKM merupakan solusi bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam keadaan krisis yaitu melakukan kegiatan usaha kecil terutama yang bersifat informal. Hal ini sedikit banyak dapat memecahkan masalah pengangguran dan pengaruhnya juga dapat dilihat dalam kaitannya dengan pendapatan. Bagaimana dengan penurunan pendapatan masyarakat yang tentunya melemahkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang sebelumnya disediakan oleh perusahaan besar?

V. KESIMPULAN

Masi Banyak pelaku pelaku usaha Yang masih belum Faham dalam penerapan Sistem Perekonomian pancasila yang dimana dengan berkembangnya zaman, Sistem perekonomian pancasila sangat efektif di terapkan oleh pelaku pelaku Usaha Mikro kecil menengah karna didalam Sistem ini kita diajarkan Berusaha dengan cara bergotongroyong dan kekeluargaan. Mengacu kedalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik.

Maka dari itu pentingnya menerapkan sistem ekonomi pancasila untuk Usaha yang sedang kita jalankan karna dengan adanya nilai kekeluargaan. Atau bisa kita bilang bergotong royong. Segala hal yang kita kejar dan kita targetkan. Ketika kita selesaikan bersama sama dengan semangat yang sama maka hasil yang kita inginkan 100% tercapai.

DAFTAR REFERENSI

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>

<https://www.harmony.co.id/blog/sistem-ekonomi-pancasila-pengertian-fungsi-dan-tujuannya>

Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 27-42.

Dr. Mukti Fajar ND. 2016. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Baswir, R. (2009). *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*. Yogyakarta: Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada

Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.23 No.3, 503-528.

Salim, A. (2019). *Ekonomi Pancasila Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Ekonomi*. Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi, Vol.2 No.1, 16-30.

Kurniawan, I. D., & Lahir, S. (2017). Sistem Kapitalisme Negara Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, Vol.1 No.2.

Al-Hakim, N. (2021). Menata Ulang Bisnis F&B Pasca Pandemi (Studi Kasus: Strategi Komunikasi Pemasaran Sate Taichan “Goreng”). *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 3(2), 85-106.

Susanto, A. F. (2015). *Penelitian hukum: transformatif-partisipatoris*.